



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

Layanan Informasi Dokumentasi,
Inovasi dan Kebijakan dalam
Mendukung Implementasi
Keterbukaan

2024



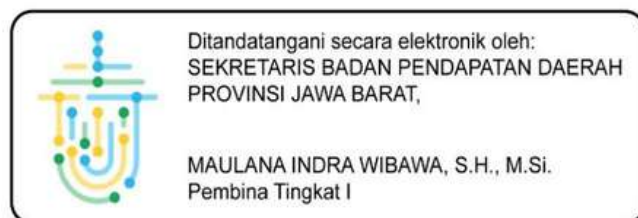
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan atas amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

bentuk Laporan Layanan Informasi Publik ini merupakan suatu pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan layanan informasi publik pada masyarakat maupun **stakeholder** terkait melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Dibuat di Bandung
Pada tanggal 18 Januari 2024

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 1.1 Latar Belakang 4

 1.2 Maksud dan Tujuan..... 4

 1.3 Dasar Hukum 5

 1.4 Struktur Organisasi PPID Bapenda Provinsi Jawa Barat 5

BAB II GAMBARAN UMUM PPID 5

 2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Informasi Publik 5

 2.2 Sumber Daya Manusia dan Inovasi Pengembangan Layanan Informasi 9

BAB III LAYANAN INFORMASI PUBLIK 12

 3.1.1 Pelayanan Informasi Publik dan Rincian Jumlah Permintaan 12

 3.1.2 jumlah Permintaan Informasi Publik. 13

 3.1.3 Waktu Penyediaan Permohonan Informasi Publik 15

 3.1.4 SP4N LAPOR Bapenda Jawa Barat 15

 3.1.5 Rincian Rekapitulasi SP4N LAPOR Bapenda Provinsi Jawa Barat 16

 3.1.6 Alur Permohonan Informasi Publik Bapenda Jawa Barat 17

BAB IV PENUTUP 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebutuhan masyarakat akan informasi melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Disamping itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Undang-undang KIP memiliki peran untuk mengatur hak dan kewajiban Badan Publik selaku penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara serta hak dan kewajiban dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok, Sebagai pelaku pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang ini memberikan amanat agar pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, ekonomis dan dengan cara yang sederhana melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat maupun **stakeholder** terkait.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Struktur Organisasi PPID Bapenda Provinsi Jawa Barat



BAB II

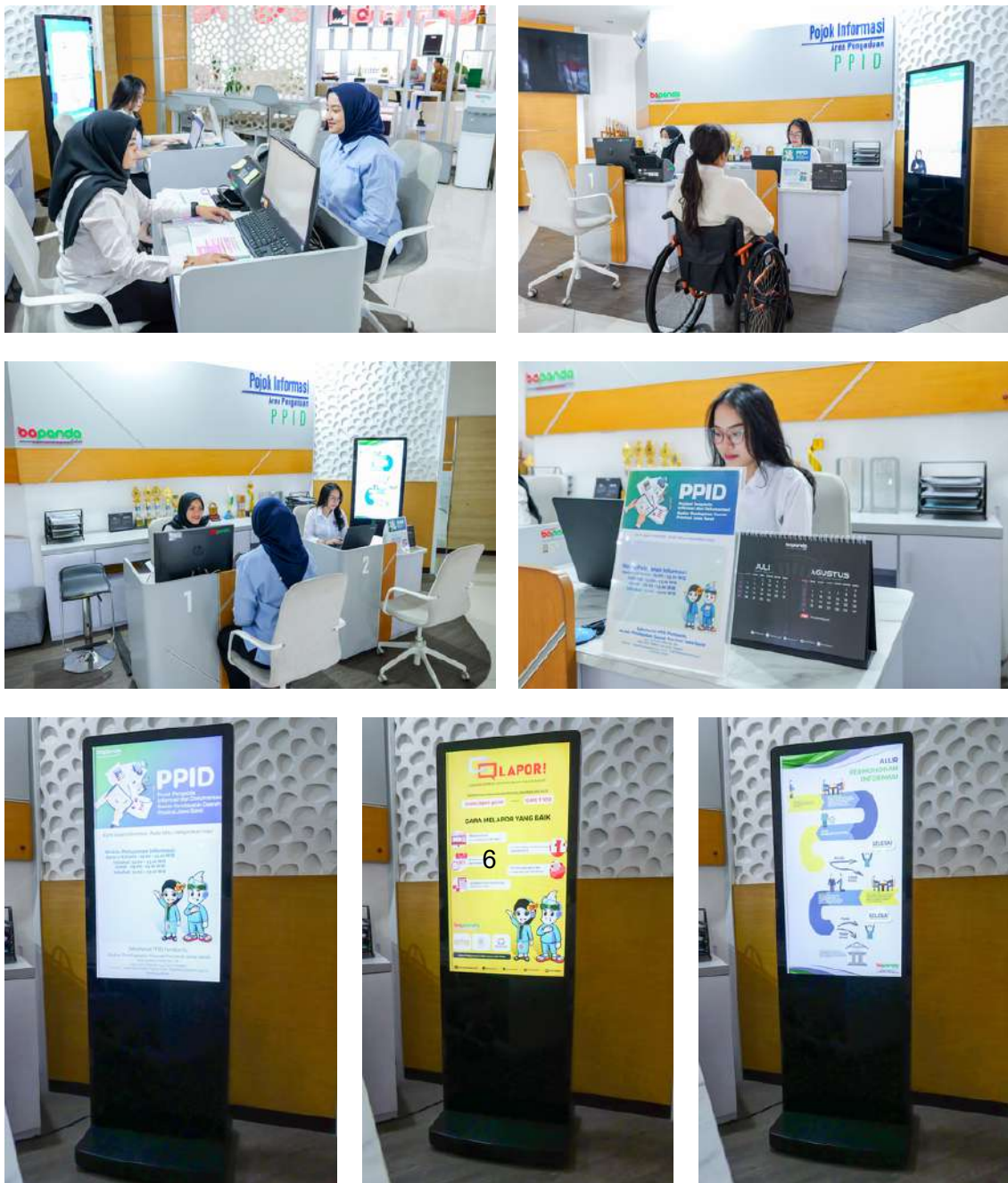
GAMBARAN UMUM PPID

2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Informasi Publik

Dalam hal pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID pada dasarnya sudah memenuhi Sarana dan prasarana layanan informasi publik sesuai ketentuan yang di harapkan seperti:

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik

a. Ruang dan Meja Pelayanan Informasi Publik



b. Papan Pengumuman Informasi




c. Sarana Khusus Bagi Pemohon Informasi Yang Berkebutuhan Khusus (difabel)



d. Formulir Permohonan Informasi Publik Bapenda Provinsi Jabar





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Soekarno Hatta No. 529 Telepon : (022) 7566197 Faksimil : (022) 7564880
Website: bapenda.jabarprov.go.id E-mail: bapenda@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40295

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
(BANGKAP DUA)

No. Pendaftaran (diisi petugas) :

Nama/ Organisasi Pemohon

No. KTP/ SIM/ Paspor

No. Akta Pendidikan (untuk organisasi)

No. SKT Kewarganegaraan (untuk organisasi)

Alamat

Pekerjaan

Nomor Telepon

e-mail

Rincian Informasi yang Dibutuhkan
(tentukan berapa file perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi
(tentukan berapa file perlu)

Cara Memperoleh Informasi **

☒ Melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat***

☐ Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/ softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi***
(jika file ingin Mendapatkan Salinan Informasi)

☐ Mengambil langsung

☐ Kurir

☐ Pos

☐ Faksimil

☒ Email

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Bandung 20.....

Pemohon

Keterangan:
**Disi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
***File yang sudah dengan membuat tanda tangan (X)
***Cara yang tidak perlu.

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Seluruh isi formulir permohonan informasi harus diisi online. Anda juga dapat melakukan permohonan informasi secara offline
/ manual dengan menggunakan formulir permohonan informasi di halaman berikut ini.

Nama/ Organisasi Pemohon :

No. KTP/ SIM/ Paspor :

No. Akta Pendidikan (untuk organisasi) :

No. SKT Kewarganegaraan (untuk organisasi) :

Cara :

Informasi :

Nomor Urutan :

Surat :

Detail 01/03/2024

Cek Status

No. File Informasi : 01/03/2024

Detail Nama Pemohon/Kategori

Cek Status

No. File Informasi : 01/03/2024


Detail Nama Pemohon/Kategori

Cek Status

No. File Informasi : 01/03/2024

Informasi yang diinformasikan :

f. Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon (022) 7566197, Faksimil (022) 7564880

Website: bapenda.jabarprov.go.id e-mail: bapenda@jabarprov.go.id

BANDUNG – 40286

UNTUK PEMOHON

No. Pendaftaran: 03/PermInfo/Bapenda/V2023

TANDA BUKTI

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari Pemohon/ Pengguna Informasi Publik:

Nama

: Yannis Renta P

Jempat, Tanggal Lahir

: Bandung, 10 Desember 2000

No. Identitas (KTP/ SIM/ Paspor)

: 3277035012000017

Nama Organisasi

: Unisha

Informasi yang Dimohonkan

: Permohonan Izin Penelitian

Oleh Desk Layanan Informasi PPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 09/01/2023

Petugas

Pemohon

(.....)

(.....)

g. Format Pemberitahuan Tertulis Sebagai Jawaban Atas Permohonan Informasi



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon (022) 7566197, Faksimil (022) 7564880

Website: bapenda.jabarprov.go.id e-mail: bapenda@jabarprov.go.id

BANDUNG – 40286

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan Permohonan Informasi yang Tanggal 09 Bulan Januari Tahun 2023 dengan nomor pendaftaran 03/PermInfo/Bapenda/V2023, Kami memberitahukan kepada Saudara/

Nama

: Yannis Renta P

Alamat

: Rg. Cisarua No 51 Cisarua

Kelurahan

: Mahajawa

No. Telp/ e-mail

: 085314613113

Tujuan Permohonan

: Permohonan Izin Penelitian

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Disediakan

No.	Hal-hal Terkait Informasi Publik	Isi/ Keterangan
1.	Bentuk fisik yang tersedia	<input checked="" type="checkbox"/> Softcopy (termasuk rekaman) Hardcopy (jika ada) sesuai
2.	Biaya yang dibutuhkan	<input checked="" type="checkbox"/> Pasokan Rp = Rp <input checked="" type="checkbox"/> Pasokan Rp <input checked="" type="checkbox"/> Lain-lain Rp <input checked="" type="checkbox"/> Jumlah Rp
3.	Waktu Respondensi Hari Bekerja
4.	Berkas dan/atau dokumen/ informasi yang dibutuhkan (melampirkan foto dan desk)	

B. Informasi tidak dapat disediakan karena:

☐ Informasi yang diminta belum didokumentasikan

☐ Berdasarkan informasi yang telah didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu Hari Bekerja

☐ Informasi yang diminta dikuasai oleh Badan Publik lain yaitu

Bandung, 09 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



SITI ANNISA SUHENDAR

NIP. 196308072010012012

h. Mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Di Tempat Pelayanan Atau Kantor Perangkat Daerah.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"





Dr. H. DEDI TAUFIK M.Si

2. Koordinasi secara berkala antara pengelola PPID Bapenda Jawa Barat dengan PIC Kehumasa di 34 P3D Se-Jawa Barat, Bidang teknis serta kepala P3D Wilayah Se-Jawa Barat (SAMSAT)

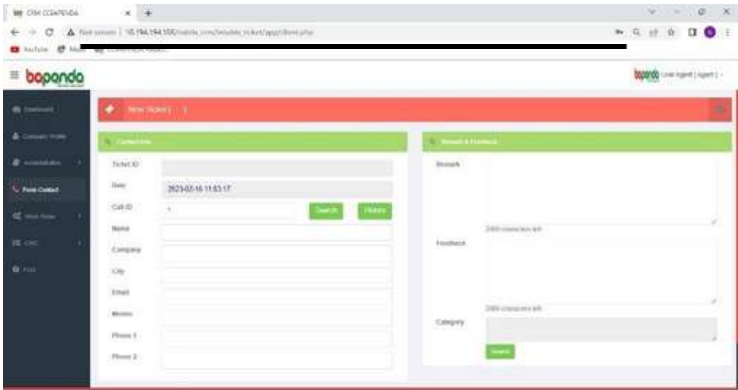


3. Inovasi Pengembangan Layanan Informasi dan Pengaduan Samsat
Information Center :

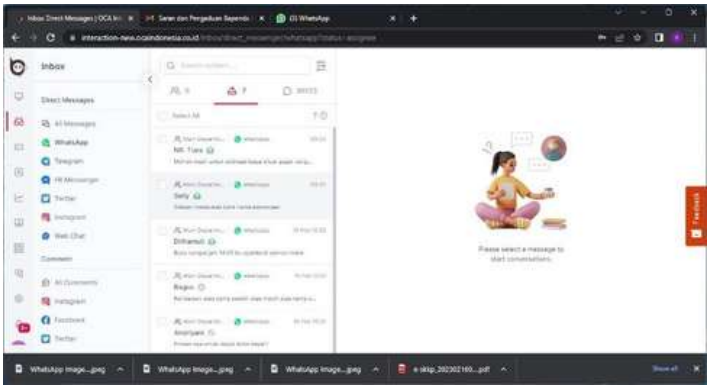
1. Samsat Information Center



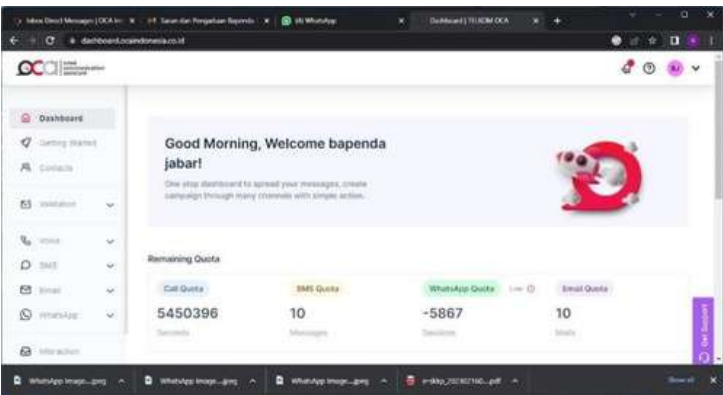
2.Call Center Halo Bapenda



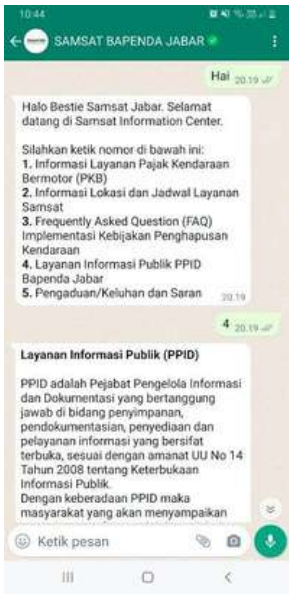
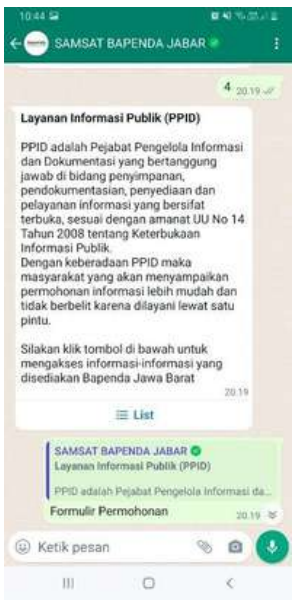
3.WhatsApp Chat Bot



4. WhatsApp Blast



5. Formulir permohonan informasi, Download Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Bapenda Jabar melalui aplikasi whats app chatbot pada Samsat Information cente



BAB III

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1.1 Pelayanan Informasi Publik dan Rincian Jumlah Permintaan

Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat disediakan secara **online** melalui **website** dan secara **offline** yaitu pemohon informasi meminta informasi dengan datang secara langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan rincian atau penjelasan terkait dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2022 pada Poin 3.1.2 tentang jumlah Permintaan Informasi Publik.



Date: ____/____/2013

[illegible]

3.1.3 Waktu Penyediaan Permohonan Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan mekanisme tersebut, PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat selalu berupaya untuk tidak melebihi jangka waktu pemberian informasi terhadap permohonan yang diminta.

3.1.4 SP4N LAPOR Bapenda Jawa Barat

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (**SP4N**) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (**LAPOR!**) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. SP4N - LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “***no wrong door policy***” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

Adapun tujuan SP4N adalah agar :

- Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
- Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.1.5 Rincian Rekapitulasi SP4N LAPOR Bapenda Provinsi Jawa Barat



FEDERATAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Soekarno Hatta No. 524 Telp. (021) 7569073 Fax. (021) 7569888
BANDUNG - 40136

Nomor : 207/NDM.04.01/Sekre

LAMPUAN SP4N LAMPUAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Soekarno Hatta No. 524 Telp. (021) 7569073 Fax. (021) 7569888

NO	Tanggal Akad	Kategori Akad	Judul Akad	Ringkasan Laporan Akad	Verifikasi	Klasifikasi	Kategori	Penyelesaian
1	4 Desember 2022	Pemeliharaan Informasi	Informasi NISN	penelitian, informasi tentang NISN di Bapenda Jawa Barat	Sesuai Akad	Pemeliharaan Informasi	200/001/000000000	000000
2	11 Januari 2023	PKB	SKPK 1000.1002	Tidak terdapat SKPK sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
3	12 Januari 2023	Pengal	Pengal 02 sesuai Rata, C. dan	Tidak terdapat pengal sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
4	17 Januari 2023	Pemeliharaan Informasi	Pemeliharaan Informasi	Berkas informasi Pemeliharaan Informasi sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
5	27 Januari 2023	PKB	Pemeliharaan Informasi	Pemeliharaan Informasi sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
6	30 Januari 2023	Pemeliharaan Informasi	Pemeliharaan Informasi	Pemeliharaan Informasi sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
7	30 Januari 2023	Rata	Pemeliharaan Informasi	Pemeliharaan Informasi sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
8	18 Maret 2023	Kategori	Kategori Pemeliharaan Informasi	Kategori Pemeliharaan Informasi sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
9	27 Maret 2023	Melakukan dan Rata	Stap 1000.1002.0001	Stap 1000.1002.0001 sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
10	27 Maret 2023	Batas dan Rata	Pemeliharaan Informasi	Pemeliharaan Informasi sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
11	8 April 2023	Pengal	Pengal 02 sesuai Rata, C. dan	Tidak terdapat pengal sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
12	12 April 2023	Pemeliharaan Informasi	Kategori Pemeliharaan	Kategori Pemeliharaan sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
13	18 April 2023	Pengal	Pengal 02 sesuai Rata, C. dan	Tidak terdapat pengal sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
14	1 Mei 2023	Pemeliharaan Informasi	Informasi NISN	penelitian, informasi tentang NISN di Bapenda Jawa Barat	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
15	1 Agustus 2023	Kategori	Kategori Pemeliharaan Informasi	Pemeliharaan Informasi sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
16	3 Agustus 2023	Akreditasi dan Rata	Akreditasi dan Rata	Akreditasi dan Rata sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
17	14 Agustus 2023	Pengal	Pengal 02	Tidak terdapat pengal sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
18	3 September 2023	Info NISN	Info NISN	Info NISN sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
19	28 September 2023	Info NISN	Pemeliharaan Informasi	Pemeliharaan Informasi sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000
20	28 September 2023	Pemeliharaan Informasi	Pemeliharaan Informasi	Pemeliharaan Informasi sesuai ketentuan pada ketentuan akad akad	Sesuai Akad	Penghasilan	200/001/000000000	000000

Bandung, 28 Desember 2023

Bupati

Sekretaris Daerah

ATASAN PISIC PISICANTU



Disampaikan secara elektronik oleh:

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

WALU KATA KATA KATA, S. H. M. S.
Pembina Teknis

BAB IV

17

3.1.6 Alur Permohonan Informasi Publik Bapenda Jawa Barat



PPID

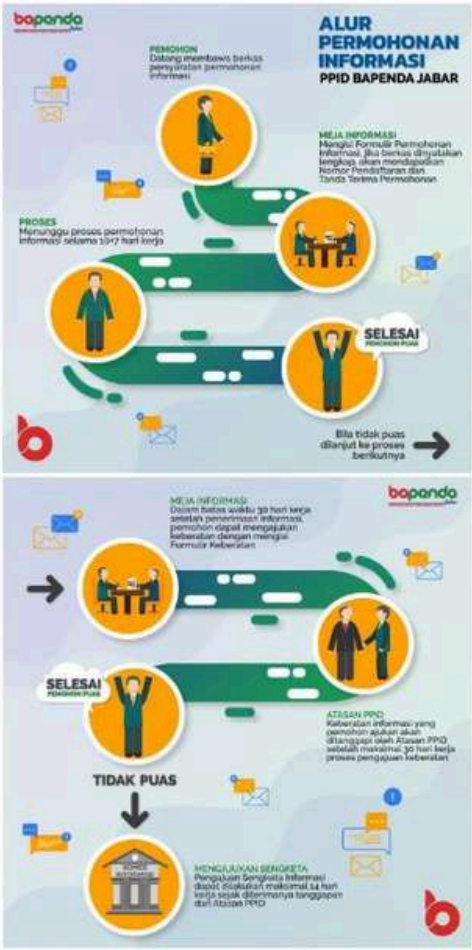
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat

Kami layani Informasi. Anda tahu, masyarakat maju!

Waktu Pelayanan Informasi:
Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
Jumat : 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB



Sekretariat PPID Pembantu
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Soekarno Hatta No. 528 Bandung 40286 - Telp. (022) 7568197 Fax. (022) 7564860
Website : bapenda.jabarprov.go.id, Email : bapenda@jabarprov.go.id



BABIV

PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini berfungsi sebagai tolak ukur pencapaian pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu kepada standar layanan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini kami buat. Kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi kami di tahun yang akan datang.

Dibuat di Bandung
Pada tanggal 18 Januari 2024
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

